Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Titi Stiawati, Shafni Aprilia
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.sdbamm15
to this article
Page 87-96
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

IMPLEMENTASI PROGRAM PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) DI KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG

Titi Stiawati*, Shafni Aprilia
Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

The problem of extreme poverty remains a strategic issue in social development in Indonesia. Through the P3KE Program, the government seeks to improve the accuracy of aid distribution while simultaneously reducing the rate of extreme poverty. This study aims to examine the implementation of the P3KE Program in Kasemen District by applying the policy implementation theory of George C. Edward III, which emphasizes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure as key dimensions. The research employed a qualitative approach, with data collected through observations, interviews, and documentation. The participants involved included the Social Affairs Office, district and village officials, social facilitators, and Beneficiary Families (KPM). Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the P3KE Program has not yet been fully effective. This condition is reflected in the limited public understanding of the program, insufficient resources, inconsistencies between administrative data and actual field conditions, the administrative-oriented disposition of implementers, as well as a hierarchical and less responsive bureaucratic structure. Therefore, strengthening communication, improving resource capacity, enhancing implementers' commitment, and refining policy systems and flexibility are necessary to ensure that the program can be implemented more effectively and accurately targeted.

Keywords: Policy Implementation, P3KE, Kasemen District

Article history:
Submission: March 10, 2026
Revised: May 29, 2026
Accepted: June 07, 2026
Published: June 15 2026

Abstrak

Permasalahan kemiskinan ekstrem masih menjadi isu strategis dalam pembangunan sosial di Indonesia. Melalui Program P3KE, Pemerintah berupaya meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program P3KE di Kecamatan Kasemen dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan Dinas Sosial, aparat Kecamatan dan kelurahan, pendamping sosial serta KPM. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program P3KE masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, ketidaksesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan, disposisi aparatur yang cenderung administrative, serta struktur birokrasi yang bersifat hierarkis dan kurang responsif. Oleh karena itu, penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan komitmen pelaksana, serta penyempurnaan sistem dan fleksibilitas kebijakan agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Program, Kebijakan, Kemiskinan Ekstrem

**Corresponding author*
Email:titi.stiawati@untirta.ac.id

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Titi Stiawati, Shafni Aprilia
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.sdbamm15
to this article
Page 87-96
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem masih menjadi salah satu permasalahan strategis dalam pembangunan sosial di Indonesia. Permasalahan ini tidak semata-mata berhubungan dengan tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memperoleh layanan dasar, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan kerja. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong cukup tinggi, dengan sebagian besar penduduk berada pada kategori kemiskinan ekstrem. Situasi tersebut menandakan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem masih membutuhkan kebijakan yang terarah, terpadu, dan tepat sasaran. Keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem tercermin melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan kembali diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya sinergi antarsektor serta pemanfaatan data yang akurat dalam pelaksanaan program-program terkait.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemerintah meluncurkan Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bertujuan meningkatkan akurasi penyaluran intervensi melalui penggunaan data berbasis *by name by address*. Data tersebut memuat identitas penerima secara rinci, termasuk nama dan alamat, sehingga bantuan yang diberikan dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran. Selain berperan sebagai program bantuan sosial, P3KE juga menjadi instrumen kebijakan yang mendukung integrasi berbagai program sektoral guna mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, penerapan Program P3KE di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa permasalahan yang kerap ditemukan meliputi ketidaksesuaian data dalam sistem dengan kondisi nyata di lapangan, keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan program tersebut. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan *top-down* dan realitas sosial di tingkat lokal.

Dalam konteks daerah, distribusi penerima manfaat Program P3KE di Kota Serang menunjukkan variasi antarwilayah. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Serang tahun 2025, jumlah penerima program tersebar di beberapa kecamatan dengan tingkat konsentrasi yang berbeda, sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1 Data Penerima Program P3KE di Kota Serang Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah KPM 2025
1.	Serang	825
2.	Cipocok Jaya	710
3.	Kasemen	1.308
4.	Taktakan	1.075
5.	Curug	911
6.	Walantaka	782
Jumlah		**5.611**

Sumber: Dinas Sosial Kota Serang, 2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menekankan beberapa prinsip dalam penyusunan APBD, antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Titi Stiawati, Shafni Aprilia
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.sdbamm15
to this article
Page 87-96
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

berorientasi pada hasil. Transparansi berarti bahwa semua informasi terkait anggaran harus dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik dikelola. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat sangat penting agar aspirasi dan kebutuhan warga dapat terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Sementara itu, orientasi pada hasil memastikan bahwa setiap alokasi anggaran harus diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang jelas.

Pada tabel tersebut, dalam konteks daerah, distribusi penerima manfaat Program P3KE di Kota Serang menunjukkan variasi antarwilayah yang cukup timpang. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Serang tahun 2025, total sasaran akumulatif di wilayah ini mencapai 5.611 KPM, di mana Kecamatan Kasemen menyumbang proporsi terbesar yaitu sebanyak 1.308 KPM atau setara dengan 23,31% dari keseluruhan kuota regional. Angka tersebut berada jauh di atas rata-rata (*mean*) beban wilayah per kecamatan di Kota Serang yang berada pada kisaran 935 KPM. Jika dibandingkan dengan wilayah dengan tingkat konsentrasi terendah seperti Kecamatan Cipocok Jaya yang hanya memiliki 710 KPM (12,65%), maka beban penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kecamatan Kasemen secara matematis berukuran hampir dua kali lipat (1,84 kali) lebih besar.

Tingginya konsentrasi data kuantitatif ini secara spasial mengonfirmasi bahwa Kecamatan Kasemen merupakan episentrum kerentanan sosial-ekonomi utama di Kota Serang. Implikasi metodologis dari besarnya angka proporsi yang mendekati seperempat total kuota kota ini menegaskan bahwa Kecamatan Kasemen secara logistik membutuhkan porsi alokasi sumber daya manusia (staf verifikator) dan anggaran operasional yang jauh lebih besar. Melalui sudut pandang teori Edward III, beban kerja administratif (*workload*) yang masif ini berpotensi memicu tekanan struktural pada aparatur tingkat kecamatan, yang apabila tidak diimbangi dengan fleksibilitas organisasi dan kecukupan fasilitas lapangan, akan langsung menurunkan akurasi validasi data serta komitmen disposisi pelaksana kebijakan. Untuk melihat kondisi secara lebih rinci, data penerima Program P3KE di Kecamatan Kasemen juga dianalisis pada tingkat kelurahan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Data Penerima Program P3KE di Kecamatan Kasemen Tahun 2022 dan 2025

No.	Kelurahan	Jumlah KPM 2022	Jumlah KPM 2025
1.	Banten	1.066	181
2.	Bendung	477	66
3.	Kasemen	737	385
4.	Kasunyatan	603	92
5.	Kilasah	647	93
6.	Margaluyu	486	73
7.	Mesjid Priyayi	417	66
8.	Sawah Luhur	465	58
9.	Terumbu	437	166
10.	Warung Jaud	640	128
Jumlah		**5.975**	**1.308**

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Serang, 2026

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Titi Stiawati, Shafni Aprilia
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.sdbamm15
to this article
Page 87-96
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Berdasarkan Tabel 2, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program P3KE di Kecamatan Kasemen mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 5.975 pada tahun 2022 menjadi 1.308 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya proses pemutakhiran data serta upaya pemerintah dalam menekan jumlah masyarakat yang tergolong miskin ekstrem. Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut pada tingkat kelurahan, masih terdapat wilayah yang mencatat jumlah penerima yang relatif tinggi, seperti Kelurahan Kasemen (385), Banten (181), dan Terumbu (166) pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan secara agregat, tingkat kerentanan sosial ekonomi di beberapa wilayah masih cukup tinggi.

Selain itu, penurunan jumlah penerima tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga dipengaruhi oleh proses verifikasi dan pemutakhiran data yang belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika perubahan kondisi masyarakat di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara data yang digunakan dalam program dengan kondisi riil masyarakat.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh karakteristik wilayah Kecamatan Kasemen yang cukup luas serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam melaksanakan proses pendataan dan verifikasi. Aparatur kecamatan dan kelurahan tidak hanya menjalankan Program P3KE, tetapi juga berbagai tugas administratif lainnya, sehingga pelaksanaan program tidak selalu berjalan secara optimal. Di sisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Program P3KE juga memicu munculnya kecemburuan sosial di masyarakat. Dari sisi kelembagaan, struktur birokrasi yang bersifat hierarkis dan terpusat turut memengaruhi pelaksanaan program. Proses pemutakhiran data yang harus melalui tahapan birokrasi yang panjang menyebabkan kebijakan kurang responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat di lapangan. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi program P3KE masih menghadapi beberapa tantangan yang kompleks.

Meskipun Program P3KE telah dilaksanakan secara nasional, kajian empiris mengenai implementasi program ini di tingkat lokal, khususnya pada level kecamatan, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji kesenjangan antara data program dengan kondisi riil masyarakat juga belum banyak dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengkaji implementasi Program P3KE secara spesifik di tingkat kecamatan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap dinamika pelaksanaan program secara lebih mendalam, khususnya dalam konteks permasalahan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kecamatan Kasemen dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah penerima P3KE yang relatif tinggi serta menghadapi berbagai permasalahan implementasi di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan Program P3KE di Kecamatan Kasemen serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilannya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kontribusi yang bermanfaat bagi penyempurnaan implementasi kebijakan, terutama dalam meningkatkan efektivitas program penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Titi Stiawati, Shafni Aprilia
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.sdbamm15
to this article
Page 87-96
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Lokasi penelitian dipilih karena memiliki jumlah penerima manfaat yang cukup tinggi serta menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program. Penentuan informan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui teknik *purposive* dan *snowball*, dengan tujuan memperoleh responden yang relevan berdasarkan saran dari informan sebelumnya. Informan yang terlibat mencakup Dinas Sosial Kota Serang, aparatur kecamatan dan kelurahan, pendamping sosial, serta KPM. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data selanjutnya mengadopsi model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Guna menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN DISKUSI

Pengelolaan keuangan daerah menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah secara efektif dan efisien, yang berarti bahwa setiap unit anggaran dan investasi yang dilakukan harus menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, daerah dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga mencakup pengawasan terhadap pengeluaran agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran, sehingga kekayaan daerah dapat memberikan dampak positif bagi seluruh warga.

Komunikasi

Menurut George C. Edward III, komunikasi adalah proses penyebaran informasi kebijakan dari tahap perumusan kebijakan kepada tim pelaksana dan kelompok sasaran yang berfokus pada keefektifan, konsistensi, dan kejelasan pesan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kecamatan Kasemen telah berjalan melalui mekanisme formal yang berjenjang. Dinas Sosial Kota Serang menyampaikan kebijakan dan pedoman teknis kepada anggota kecamatan melalui koordinasi dan pelatihan koordinasi, yang kemudian diterapkan dalam kegiatan di tingkat kelurahan dan lapangan. Secara struktural, penyampaian informasi ini telah sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Namun, efektivitas komunikasi tersebut belum berjalan optimal akibat adanya hambatan sistemik dari keterbatasan sumber daya (informasi dan finansial). Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur kelurahan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diketahui bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara utuh tujuan dan mekanisme Program P3KE. Masyarakat cenderung memaknai program ini sebagai bantuan sosial semata, bukan sebagai instrumen penghapusan kemiskinan ekstrem. Ketidakjelasan informasi di tingkat akar rumput ini merupakan dampak langsung dari keterbatasan anggaran operasional sosialisasi yang disediakan oleh sistem birokrasi. Tanpa dukungan finansial yang memadai, intensitas dan kualitas sosialisasi menyusut menjadi sekadar pertemuan formal formalitas di tingkat kecamatan, tanpa menyentuh esensi edukasi kepada kelompok sasaran.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Titi Stiawati, Shafni Aprilia
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.sdbamm15
to this article
Page 87-96
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Selain itu, dari sisi konsistensi, masih ditemukan perbedaan pemahaman di antara pelaksana di tingkat bawah, terutama terkait perubahan kebijakan dan pembaruan data yang tidak selalu disertai sosialisasi menyeluruh. Hambatan komunikasi internal ini berakar dari minimnya sumber daya teknologi informasi dan kapasitas staf yang responsif. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan program. Dampat interaktifnya, asimetri informasi antara pelaksana dan masyarakat memicu distorsi di lapangan; muncul kebingungan di masyarakat yang sering kali berkembang menjadi kecemburuan sosial terkait penetapan penerima bantuan.

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi tidak dapat berdiri sendiri dan sangat bergantung pada pasokan sumber daya. Komunikasi yang buruk di Kecamatan Kasemen pada akhirnya melemahkan dimensi disposisi (sikap) masyarakat dan aparatur, di mana ketidakjelasan pesan melahirkan resistensi sosial dan kebingungan interpretasi. Hal ini sejalan dengan teori George C. Edward III yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi mensyaratkan keterkaitan erat antara kejelasan informasi dan kesiapan instrumen pendukungnya.

Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, Sumber daya merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, fasilitas, informasi, serta anggaran guna mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Pada aspek sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program P3KE di Kecamatan Kasemen masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta kualitas data yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur kecamatan dan kelurahan, jumlah personel yang terlibat dalam pelaksanaan program masih terbatas, sementara beban kerja yang harus ditangani cukup tinggi karena aparatur juga menjalankan tugas administratif lainnya.

Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial ini memiliki efek domino yang merusak efektivitas variabel komunikasi dan disposisi pelaksana. Minimnya jumlah personel berdampak langsung pada kurang optimalnya proses verifikasi dan pemutakhiran data di lapangan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal sehingga ditemukan perbedaan antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Ketidakakuratan sumber daya data (informasi) ini pada gilirannya melumpuhkan kredibilitas komunikasi birokrasi kepada masyarakat; pelaksana tidak mampu memberikan kejelasan informasi logis ketika masyarakat mempertanyakan basis data penerima bantuan.

Dari sisi fasilitas, meskipun perangkat teknologi informasi telah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis seperti sistem yang lambat atau mengalami gangguan. Selain itu, keterbatasan kendaraan operasional juga menjadi hambatan dalam kegiatan lapangan, terutama mengingat luasnya wilayah Kecamatan Kasemen. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan verifikasi dan pendampingan berjalan kurang optimal.

Secara teoretis, kelangkaan sumber daya finansial, fasilitas, dan manusia ini secara multiplikatif mendegradasi aspek disposisi (komitmen) para implementor. Ketika beban kerja administratif melampaui kapasitas riil staf tanpa didukung insentif operasional yang layak, motivasi psikologis pelaksana menurun drastis. Staf di Kecamatan Kasemen dipaksa untuk bekerja dalam "mode bertahan", yang mengarahkan mereka pada sikap apatis dan cenderung

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Titi Stiawati, Shafni Aprilia
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.sdbamm15
to this article
Page 87-96
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

menghindari inovasi demi menyelesaikan pelaporan formal semata. Hubungan kausalitas ini mempertegas pandangan Edward III bahwa *resources* adalah *enabler* utama yang menentukan apakah instruksi kebijakan (komunikasi) dapat diwujudkan secara nyata oleh aktor kebijakan

Disposisi

Menurut George C. Edward III, disposisi merujuk pada komitmen, sikap, serta kecenderungan perilaku para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu program, sehingga mereka memiliki kemampuan dan dorongan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada aspek disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pelaksana memiliki komitmen untuk menjalankan Program P3KE sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksana tetap berupaya menjalankan program meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Namun demikian, analisis mendalam menunjukkan bahwa disposisi yang terbentuk di Kecamatan Kasemen bersifat "administrative-defensive", yang dikondisikan secara paksa oleh keterbatasan sumber daya dan kakunya struktur birokrasi. Dalam praktiknya pelaksanaan program masih cenderung bersifat administratif dan berorientasi pada pemenuhan kewajiban. Aparatur menjalankan program sesuai aturan untuk menghindari permasalahan hukum atau teguran struktural, tetapi belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian tujuan substantif pengentasan kemiskinan.

Sikap pragmatis ini muncul sebagai respons rasional pelaksana terhadap kelangkaan insentif (sumber daya anggaran) dan tidak jelasnya indikator kinerja yang dikomunikasikan. Kurangnya insentif tambahan memengaruhi motivasi kerja, sehingga aparatur cenderung menjalankan tugas sesuai standar minimal. Di sisi lain, tekanan sosial dari masyarakat, seperti adanya kecemburuan sosial akibat ketidaktepatan sasaran bantuan (yang disebabkan data usang dari sub-bab Sumber Daya), turut mengikis komitmen psikologis pelaksana di lapangan. Dalam beberapa kasus, aparatur harus mengambil jalan kompromistis untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat, bahkan jika harus mengorbankan akurasi target kebijakan.

Hubungan antar-variabel di sini terlihat jelas: keterbatasan sumber daya (sarana dan insentif) berinteraksi dengan lemahnya konsistensi komunikasi dari atas, yang pada akhirnya mematikan disposisi progresif pelaksana. Pelaksana tidak memiliki ruang diskresi dan dorongan internal untuk bertindak responsif karena mereka terkunci dalam struktur yang menuntut kepatuhan formalitas. Hal ini menguatkan tesis Edward III bahwa jika disposisi pelaksana tidak didukung oleh insentif yang memadai (*resources*) dan perintah yang konsisten (*communication*), maka implementasi kebijakan akan terjebak dalam rutinitas administratif yang mandul.

Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan susunan organisasi, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi yang mengatur pelaksanaan kebijakan, termasuk keberadaan standar operasional prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan antarlembaga.

Pada aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal pelaksanaan Program P3KE telah memiliki pedoman dan petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah pusat. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program, mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan.

Namun dalam praktiknya, karakteristik struktur birokrasi yang bersifat hierarkis dan

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Titi Stiawati, Shafni Aprilia
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.sdbamm15
to this article
Page 87-96
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

terpusat (*top-down*) bertindak sebagai "jangkar" yang menghambat fleksibilitas alokasi sumber daya dan mendistorsi alur komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur kecamatan dan kelurahan, proses pemutakhiran data tidak dapat dilakukan secara langsung di tingkat bawah dan harus melalui tahapan birokrasi yang cukup panjang. Mekanisme birokrasi yang rigid ini menyebabkan sumber daya informasi (data kemiskinan) selalu terlambat diperbarui, sehingga komunikasi yang disampaikan ke masyarakat selalu berbasis pada data usang yang tidak lagi relevan dengan dinamika sosial.

Selain itu, koordinasi antarinstansi memang telah dilakukan melalui rapat koordinasi dan komunikasi formal, namun belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Koordinasi yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif dan berfokus pada pelaporan. Struktur yang kaku ini membatasi kemampuan pelaksana di tingkat kecamatan untuk mengalokasikan atau mengalihkan sumber daya (staf dan anggaran) secara fleksibel guna merespons kondisi darurat di lapangan.

Akibatnya, sistem birokrasi yang ada menghancurkan aspek responsivitas dalam dimensi disposisi pelaksana. Karena semua keputusan final mengenai data berada di tingkat pusat/kota, aparatur di Kecamatan Kasemen merasa tidak memiliki *ownership* (rasa memiliki) terhadap program ini, yang akhirnya membentuk disposisi apatis dan pasif. Hubungan interaktif ini membuktikan bahwa struktur birokrasi yang kaku menjadi variabel hulu yang mengunci keterbatasan sumber daya, menyumbat kelancaran komunikasi, dan akhirnya mendegradasi disposisi pelaksana di tingkat lokal. Penegasan ini sangat sejalan dengan inti teori Edward III mengenai pentingnya integrasi struktural yang adaptif demi efektivitas kebijakan.

Keempat aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mengunci dan memengaruhi secara kausalitas, di mana struktur yang kaku dan keterbatasan sumber daya menjadi pemicu utama rapuhnya komunikasi dan terbentuknya disposisi pelaksana yang sekadar bersifat administratif formalitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, belum berjalan secara optimal jika ditinjau dari empat aspek implementasi kebijakan.

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan secara berjenjang, namun belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat serta perbedaan interpretasi di tingkat pelaksana, yang berdampak pada munculnya kesalahpahaman dan kecemburuan sosial di masyarakat.

Pada aspek sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta kualitas dan pembaruan data menjadi kendala dalam pelaksanaan verifikasi dan pemutakhiran data, sehingga menyebabkan perbedaan antara data dalam sistem dan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Pada aspek disposisi, aparatur pelaksana menunjukkan komitmen dalam menjalankan program, namun pelaksanaannya masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian tujuan substantif program. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, sistem yang bersifat hierarkis dan terpusat menyebabkan proses pemutakhiran data menjadi lambat serta kurang responsif terhadap dinamika kondisi masyarakat di lapangan.

Dengan demikian, keempat aspek penerapan kebijakan berdasarkan teori George C. Edward

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Titi Stiawati, Shafni Aprilia
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.sdbamm15
to this article
Page 87-96
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

III masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya dan saling memengaruhi, sehingga berdampak pada belum optimalnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program P3KE di Kecamatan Kasemen.

Rekomendasi Implementatif Guna mengatasi berbagai hambatan interaktif di atas, berikut adalah rekomendasi konkret yang dapat diterapkan secara taktis di lapangan:

Penguatan Komunikasi Melalui Edukasi Berbasis Komunitas (Kultural): Dinas Sosial Kota Serang bersama Aparatur Kecamatan Kasemen harus menggeser model sosialisasi *top-down* yang bersifat formal-birokratis menjadi dialog interaktif berbasis komunitas. Rekomendasi konkretnya adalah menginisiasi program "Rembuk Warga P3KE" di tingkat kelurahan dengan melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan pendamping sosial. Sosialisasi tidak boleh sekadar membacakan juknis, melainkan mengedukasi masyarakat mengenai indikator pemeringkatan kesejahteraan (Desil 1-4) agar masyarakat memahami bahwa P3KE adalah program pemberdayaan berkeadilan, bukan sekadar "pembagian bantuan sosial biasa". Langkah ini krusial untuk meminimalkan kecemburuan sosial.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lewat Kemitraan Strategis Regional: Mengingat Kecamatan Kasemen memikul beban kuota KPM tertinggi se-Kota Serang (23,31%) sementara jumlah staf kecamatan sangat terbatas, pemerintah daerah harus melakukan intervensi sumber daya secara khusus. Jurnal ini merekomendasikan pembentukan Kemitraan Pendataan Lokal dengan memanfaatkan potensi Mitra Statistik Regional (BPS) atau melakukan kolaborasi program pengabdian masyarakat (KKN Tematik) dengan perguruan tinggi setempat, seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Penambahan tenaga verifikator lapangan *ad-hoc* ini dibarengi dengan penyediaan anggaran operasional khusus/fasilitas kendaraan taktis dari APBD Kota Serang untuk memetakan wilayah geografis Kasemen yang luas secara presisi.

Restrukturisasi Alur Birokrasi Melalui Pembentukan "Posko Pemutakhiran Data Mandiri": Untuk memotong rantai birokrasi yang hierarkis dan lambat dalam pemutakhiran data, Pemerintah Kota Serang perlu mengeluarkan regulasi (Peraturan Wali Kota) yang memberikan diskresi terbatas kepada kelurahan. Bentuk konkretnya adalah mendirikan "Posko Pemutakhiran Data Mandiri P3KE" di setiap kantor kelurahan yang terintegrasi secara digital menggunakan aplikasi sistem informasi desa/kelurahan yang terhubung langsung ke basis data Dinas Sosial. Dengan posko ini, data warga yang meninggal, pindah, atau sudah mengalami peningkatan kesejahteraan dapat diverifikasi dan dilaporkan secara *real-time* tanpa harus menunggu instruksi berjenjang dari pusat yang memakan waktu berbulan-bulan.

Transformasi Disposisi Pelaksana Melalui Skema *Insentif Berbasis Kinerja* (Reward & Punishment): Sikap aparatur yang cenderung *administrative-oriented* (sekadar menggugurkan kewajiban penyerahan laporan) harus diubah menjadi *outcome-oriented* (berorientasi pada akurasi target pengentasan kemiskinan). Pemerintah Kecamatan perlu merumuskan indikator kinerja utama (IKU) yang spesifik bagi petugas pendamping dan aparatur kelurahan dalam hal ketepatan validasi data lapangan. Petugas yang mampu menyajikan data paling akurat dan responsif terhadap keluhan warga diberikan penghargaan berupa insentif finansial operasional tambahan atau prioritas pengembangan karier, sedangkan kelalaian pendataan yang berulang harus dikenai evaluasi administratif yang tegas.

REFERENSI

Agustino, L. (2019). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Titi Stiawati, Shafni Aprilia
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.sdbamm15
to this article
Page 87-96
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Astuti, D. (2024). Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Konvergensi dan Inovasi Program. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(3), 356. Diunduh dari: https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora/article/view/4123

Bank, W. (2022). Poverty and Shared Prosperity 2022: Piecing Together the Poverty Puzzle. Washington, DC: World Bank.

Donald J. K. Lumingkewas, S. B. (2025). Implementasi Kebijakan Bantuan Tunai Langsung Berbasis DTKS dan P3KE Desil 1 di Kabupaten Langowan Timur. Jurnal Internasional Teknologi Informasi dan Pendidikan (IJITE), 4(3), 115-123. Diunduh dari: https://ijite.jredu.id/index.php/ijite/article/view/246

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (n.d.). Jakarta: Sekretariat Negara.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (n.d.). Jakarta: Sekretariat Negara.

M Kholis Hamdy, &. H. (2025). Implementasi Program BLTKE (Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem) Di Dusun Wanasuka, Desa Wanasuka, Bandung, Jawa Barat. Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(2). Diunduh dari: https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/view/8022

Suharto, E. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

TNP2K. (2024). Laporan Pelaksanaan Program P3KE 2024. Jakarta: Sekretariat TNP2K.

Nations, U. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license